

## **Pendidikan Bela Negara di dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia**

**Zainal Muhtar<sup>1✉</sup>, Yanti Yulianti<sup>2</sup>, Hanang Hanafiah<sup>3</sup>**

Universitas Pertahanan<sup>1</sup>, IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>2</sup>, Universitas  
Islam Nusantara<sup>3</sup>

Email :zainal\_muhtar90@yahoo.co.id<sup>1</sup>, adeyanti411@gmail.com<sup>2</sup>,  
hanafiah@uinus.ac.id<sup>3</sup>

---

Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-29; Published: 2021-09-30

---

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a developing country that is still trying to improve the quality of education. The quality of education is a focus that needs to be considered by the government and the elements society in advancing the Indonesia nation. Education is something that is related to human development. The process cannot be separated from the psychological, human, and environmental. This study aims to determine of how the implementation of state defense education in Universitas Pertahanan curriculum is applied. The research method used is library research. The technique of this method is to collecting some reading references that are relevant to the studied problems. The literature study method was also involved in this study to support the results. The results of this study prove the needs for state defense education for students as the nation's next generation should receive an attention from the policy makers such as the government and education environment. The various threats that will be faced are not only from military, yet it become more complex. It can be worried as it can erode the student's senses of nationalism. The role of the government and educators is important to provide broad opportunities for the students to develop their knowledge in innovation and creativity. The students that can develop their knowledge hopefully can make proud of their country and the nation. Packaging in providing state defense education for students is need to be more innovative, in addition the students are able to understand deeply about defending their state and the importance of a sense of the nationalism to strengthen their state sovereignty.*

*Keywords:*National defense education, Indonesian Nation, National defense curriculum

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berusaha dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Kualitas Pendidikan merupakan fokus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah serta elemen masyarakat dalam memajukan Bangsa Indonesia. Pendidikan adalah suatu hal yang terkait dengan perkembangan manusia. Prosesnya tidak terlepas dari psikologis, manusia, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan sejauh mana implementasi Pendidikan bela negara di dalam kurikulum Universitas Pertahanan diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu teknik pengumpulan referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode studi literatur juga dilibatkan dalam penelitian ini untuk mendukung hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini membuktikan kebutuhan Pendidikan bela negara untuk kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapat perhatian dari pemangku kebijakan dari lingkungan pemerintah dan pendidikan. Berbagai ancaman yang dihadapi tidak hanya militer namun semakin kompleks sehingga dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme pelajar. Peran pemerintah dan pendidik penting untuk memberikan kesempatan luas pada pelajar dalam mengembangkan ilmunya secara inovasi dan kreativitas, sehingga pelajar yang dapat mengembangkan ilmunya akan membanggakan negara dan mengharumkan nama bangsa dengan hal positif. Pengemasan dalam pemberian Pendidikan bela negara pada pelajar perlu lebih inovatif supaya pelajar mampu memahami lebih mendalam mengenai bela negara dan pentingnya rasa nasionalisme untuk memperkuat kedaulatan negara.

Kata kunci : Pendidikan Bela Negara, Bangsa Indonesia, Kurikulum Bela Negara

---

Copyright © 2021 Eduprof : Islamic Education Journal  
Journal Email : [eduprof.bbc@gmail.com](mailto:eduprof.bbc@gmail.com) / [jurnaleduprof.bungabangsacirebon.ac.id](http://jurnaleduprof.bungabangsacirebon.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berkembang masih berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus menerus. Kualitas pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat karena kemajuan bangsa Indonesia ikut dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teori dan praktik yang berkembang dalam kehidupan. Semakin tinggi cita-cita maka manusia semakin menuntut. Peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-citanya. Akan tetapi di balik itu, semakin tinggi cita-cita yang hendak diraih, maka semakin kompleks jiwa manusia itu, karena di dorong oleh tuntutan hidup (rising demands) yang meningkat pula (Arifin dan Aminudin, 1997: 2).

Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman (Pidarta, 2013: 2). Berarti pendidikan membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Proses pendidikan tidak terlepas dari faktor psikologis, fisik manusia dan pengaruh faktor lingkungan. Proses pendidikan harus berpegang pada petunjuk-petunjuk para ahli psikologi, terutama psikologi pendidikan, perkembangan dan psikologi agama (Rusmaini, 2011: 1). Dengan demikian, proses pendidikan akan berlangsung secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Menurut Crow and Crow sebagaimana dikutip Nanang Fattah (2011: 5), modern educational theory and practise not only are aimed at preparation for future living but also are operative in determining the pattern of present, day-by-day attitude and behavior. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berlangsung dalam segala lingkungan dan seumur hidup untuk mengembangkan potensi diri. Untuk menuju point education change (perubahan pendidikan) secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan

adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan out-put yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan.

Bela negara merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh tiap individu masyarakat guna mendukung sistem pertahanan semesta yang dianut oleh Indonesia. Sistem pertahanan semesta membutuhkan setiap komponen masyarakat untuk ikut serta aktif dalam membela tanah air. Adanya rasa bela negara yang kuat akan mendorong masyarakat untuk membela tanah air dengan segenap tumpah darah, namun apabila rasa bela negara itu sendiri tidak dimiliki tentunya akan membuat masyarakat enggan ikut serta dalam pertahanan semesta. Rasa bela negara harus ditumbuhkan sejak sedini mungkin mulai dari bangku sekolah. Salah satunya adalah pada sekolah tingkat sekolah menengah atas dimana pada usia ini para pemuda rentan untuk mencari jati diri mereka. Pendidikan yang baik akan melahirkan pemuda yang baik pula, dan apabila pendidikan tentang bela negara disini diajarkan dengan baik maka dapat melahirkan sikap yang baik juga pada pemuda. Pemuda sebagai ujung tombak Indonesia dimasa depan tentu harus dipersiapkan dengan sangat baik agar kedepannya dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Pemuda merupakan penggerak masa depan dimana yang memegang tonggak perjuangan pada masa depan merupakan pemuda. Generasi tua dalam hal ini memegang peran mengantarkan pemuda ke gerbang masa depan untuk berjuang dengan sebaik-baiknya (Wantannas 2018).

Kurikulum digunakan sebagai pegangan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Kurikulum ialah sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling menunjang satu sama lain karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dari komponen-komponen ini lah kurikulum dapat berjalan menuju tujuan

pendidikan dengan adanya kerjasama pada seluruh komponen tersebut. Apabila terdapat salah satu komponen yang tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan tidak baik dan kurang maksimal. Kurikulum nasional saat ini yang digunakan adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mana keduanya berbasis kompetensi. Sebelumnya, pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum 1994 yang mana lebih menekankan pada standar isi atau materi pelajaran, dan pada kurikulum ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Pada kurikulum ini guru menjadi sumber satu-satunya dalam belajar dan menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas (Hidayat 2020).

Lain halnya dengan kurikulum nasional yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan pengembangan kurikulum yang menfokuskan pada kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum, suatu pengorganisasian pada seluruh komponen sangat diperlukan. Pada proses pengorganisasian ini berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses-proses tersebut. Sehingga, dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, pelaku yang mengelola sebuah lembaga pendidikan perlu menguasai ilmu manajemen, baik untuk pendidikan maupun kurikulumnya (Sumar dan Razak 2016).

Manajemen adalah suatu proses melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *curir* yang berarti “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”, sehingga *curriculum* diartikan “jarak yang harus ditempuh oleh pelari” (dalam istilah olah raga). Sedangkan dalam istilah pendidikan diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh anak/peserta didik guna memperoleh ijazah atau menyelesaikan pendidikannya. (Khaerudin 2007)

Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan sebuah kurikulum yang dilakukan sekelompok orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari proses perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum hingga

evaluasi atau control dari seorang manajer atas kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan. Manajemen dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan oleh manajer dan anggotanya secara koperatif. Begitu pula apabila prinsip manajemen diterapkan dalam kurikulum. Diharapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat menciptakan sebuah kurikulum yang sesuai dengan sekolah bertaraf internasional. Di dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah adalah manajer yang berhak atas penentuan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan menggunakan fungsi dan prinsip manajemen, diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk sebuah kurikulum yang sesuai dengan sekolah bertaraf internasional.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Subagyo 2018, yang menyatakan bela negara sangat penting bagi bangsa Indonesia mengingat sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta dimana rakyat merupakan komponen pendukung yang harus siap membela negara dari berbagai ancaman musuh. Kesiapan yuridis, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan kultural dalam menyelenggarakan program bela negara sangat diperlukan bagi mewujudkan sistem pertahanan negara (Subagyo, 2018). Penelitian lainnya membahas penerapan konsep bela negara yang dilakukan oleh Umra 2019. Dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan konsep bela negara yang lebih menitikberatkan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila terkait karakter atau perilaku. Sudut pandang yang menjadi fokus penulis dituangkan dalam bentuk kebijakan penerapan bela negara dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan melalui kebijakan tentang bela negara. Program bela negara yang dilakukan secara mendadak oleh Kementerian Pertahanan seharusnya menjadi ranah kementerian pendidikan sehingga dapat dihasilkan sebuah solusi yang dapat mewujudkan program intra-kulikuler dengan mengintegrasikan program pendidikan kesadaran bela Negara dan pembangunan karakter bangsa ke dalam mata pelajaran; dan ekstra-kulikuler dengan menerapkan kegiatan intra-kulikuler ke dalam berbagai kegiatan ekstra-kulikuler yang dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan pelaksanaan yang direncanakan dengan matang dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan sehingga mudah dikontrol dan dievolusi. Penerapan program pelatihan seharusnya disesuaikan dengan

tuntunan zaman ini dalam pelaksanaan bela negara di Indonesia (Umra 2019).

Tujuan penulisan ini mengetahui sejauh mana bentuk implementasi kebijakan dalam penerapan pendidikan berbasis bela negara di kalangan milenial dengan metode studi kepustakaan. Data akan didapat melalui studi kepustakaan dan diperkuat dengan bukti-bukti dari buku, sumber internet, majalah, serta makalah yang membahas kebijakan pemerintah dalam menerapkan pendidikan berbasis bela negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kepustakaan atau library research. Metode ini bekerja dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan tidak mungkin mengaharapkan datanya dari riset lapangan. Studi pendahuluan (preliminary research) menjadi acuan untuk memahami lebih lanjut dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau masyarakat. Data pustaka sangat andal dalam menjawab persoalan penelitian. Informasi atau data empirik yang dikumpulkan oleh peneliti lain, baik berupa laporan hasil penelitian, laporan resmi, dan buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat dipergunakan oleh periset kepustakaan. Data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan bagi menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed 2008).

Selanjutnya penulis melakukan pemahaman secara teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan hasil temuan penelitian. Studi literatur digunakan oleh peneliti secara mendalam guna mendukung penelitian. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan sejumlah buku dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan berbagai

teori yang relevan dalam permasalahan yang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian lain dari studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur merupakan cara penyelesaian persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun studi literatur juga disebut sebagai studi pustaka (Handriani 2017)..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendidikan Bela Negara**

Pendidikan dapat diartikan secara harfiah sebagai proses perubahan sikap dan perilaku individu atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia dengan pengajaran dan pelatihan. Sementara itu, pengertian umum dari pendidikan ialah menanamkan nilai moral, intelegensi, dan spiritual kepada peserta didik menyesuaikan perkembangan mental dan jasmaninya (Prihatin, 2018). Umumnya, pendidikan memiliki keterkaitan dengan mempersiapkan generasi bangsa yang berpengetahuan. Pendidikan untuk penyiapan warga negara dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang terencana untuk memberikan bekal kepada peserta didik supaya menjadi warga negara yang baik (Sormin, 2020).

Di dalam upaya mencapai tujuan nasional suatu negara, bela negara adalah salah satu cara yang perlu ditempuh (Budiwibowo, 2016). Di dalam prosesnya mencapai tujuan nasional, suatu negara akan mendapatkan atau menghadapi ancaman yang bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mempertahankan eksistensinya di semua lini seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan juga kedaulatan. Untuk mempertahankan kedaulatan ini memerlukan kerjasama dari seluruh komponen (Rahmawati, 2017). Penanaman kesadaran akan bela negara sangat penting dilakukan untuk mempertahankan negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar, mengingat juga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap bela negara. Upaya pembelaan negara merupakan tekad, sikap, dan juga tindakan warga yang teratur, terpadu, menyeluruh serta berlanjut yang berlandaskan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan

keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 (Pitaloka, 2019). Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam membela negara, warga perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai bela negara dalam arti yang luas. Dalam arti luas, bela negara tidak hanya berkaitan dengan menghadapi ancaman perang tetapi juga ancaman dalam bentuk lain. Adapun penjelasan secara luas tentang hak dan kewajiban setiap warga negara di dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan tercantum pada pasal 27 dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Pengertian bela negara secara harfiah yaitu pembelaan terhadap negara yaitu negara Indonesia. Bela negara diartikan sebagai cerminan dari sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (PKBN Kemenhan, 2016). Di dalam rumusan pengertian bela negara tersebut mengandung makna yaitu bela negara lahir pada tahun 1945 dalam konteks bentuk dan kedaulatan negara yang wajib dibela dan dipertahankan, yaitu NKRI. Sedangkan untuk bentuk negara, menurut Kaelan (2013), bahwa dalam proses pembahasan tentang bentuk negara sebagaimana terkandung di dalam pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, hampir semua tokoh pendiri bangsa menolak paham individualisme-liberalisme, maupun negara kelas, baik Soekarno, Yamin, Hatta, Soepomo dan pendiri negara lainnya.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Kaelan, ada lima kesatuan, yakni: 1) Kesatuan suku, agama, ras dan antar golongan; 2) Kesatuan nasib yang berkembang dari akar sejarah yang panjang; 3) Kesatuan wilayah nusantara; 4) Kesatuan azas kerohanian; dan 5) Kesatuan tujuan bersama. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” seharusnya dipertahankan mati-matian. Sedangkan menurut Kaelan (2013) dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ayat ini menunjukkan bahwa

lembaga yang merupakan subjek penjelmaan kedaulatan yang tidak jelas.

Pada hakikatnya, kesadaran akan bela negara berarti bersedia berkorban membela negara. Bentuk dari bela negara ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi warga serta bentuk ancaman yang dihadapi karena ancaman dapat berupa ancaman militer maupun non militer. Sehingga pada intinya, dalam upaya bela negara, setiap warga negara melakukan tindakan apapun yang terbaik untuk bangsa dan negaranya berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Wijayanto, 2018).

Menurut Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, unsur dasar bela negara dibagi menjadi lima poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Cinta tanah air.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan bernegara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Terdapat lima ancaman utama, yakni: 1) senjata biologi, 2) nuklir, 3) serangan *cyber*, 4) ancaman militer dan non militer, 5) serta ancaman hibrida. Sementara itu, sepuluh tren utama kamanan masa depan yaitu: 1) senjata bio teror, 2) *dirty bombs*, atau bom-bom pencemar, 3) *World War III* atau Perang Dunia III, 4) serangan dunia maya (*cyber attack*), 5) *future crime* atau kejahatan berteknologi tinggi, canggih dan berbahaya, 6) *identity* atau identitas yang bisa diperjualbelikan, 7) *end of privacy* atau perdagangan pribadi, 8) *personal security market emerges* atau pasar keamanan pribadi, 9) *Extreme pandemics* atau penyakit ekstrim berupa wabah-wabah baru yang dahsyat seperti SARS, flu burung, AIDS, dan ebola, dan 10) *Neuro war* atau perang neuro. Diantara beberapa ancaman utama dan tren utama masa depan yang disebutkan sebelumnya, terdapat tiga jenis ancaman yang mesti dipertimbangkan sebagai ancaman dalam klasifikasi ancaman aktual prioritas, yaitu 1) ancaman non militer (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, teknologi, 2) hibrida (kombinasi non militer dan militer, berupa: *asymetric warfare*, *information warfare*, *chemical*,

*biological, radiological, nuclear dan explosive/CBRNE*, dan kriminal yang beragam, dan 3) ancaman militer (perang dunia, invasi militer, kudeta).

Program sosialisasi Bela Negara yang merupakan program turunan dari Nawa Cita ke-8 Presiden Republik Indonesia harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, yaitu: “melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia” (Iryanti 2015).

Pendidikan bela negara menjadi sangat penting karena dipandang relevan dan strategis untuk pembinaan pertahanan negara dan untuk meningkatkan pemahaman serta penanaman jiwa patriotisme dan cinta terhadap tanah air yang sudah semestinya kesadaran berbangsa dan bernegara tumbuh berkembang di seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanakan pembinaan kesadaran bela negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat baik, ditambah pemerintah yang sudah menerapkan pendidikan bela negara dari tingkat sekolah dasar sebagai pondasi awal peserta didik untuk mengenal dan membentuk karakternya seperti misalnya bertanggung jawab dengan mengerjakan pekerjaan rumah, membuang sampah pada tempatnya, menolong temannya yang kesusahan. Semua sikap tersebut sudah mencerminkan sikap dan karakter yang baik dan perlu untuk diperhatikan. Namun, keterbatasan guru dalam mengajar bela negara dikarenakan belum masuknya pendidikan bela negara ke dalam kurikulum, sehingga guru harus pintar-pintar untuk menerapkan nilai-nilai ini di sela-sela pelajaran non formal, seperti ekstra kurikuler (Umra 2019).

Penelitian tentang implementasi pelatihan kader bela negara di Rindam Jaya merupakan salah satu kajian dalam membuktikan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam mendukung Pertahanan Negara diberlakukan. Penelitian ini dilaksanakan oleh Sahadi 2017 untuk menjawab permasalahan Penyelenggaraan Pelatihan Kader Bela

Negara, Kemampuan Pelatih dan Manfaat Pelatihan Kader Bela Negara guna mendukung Pertahanan Negara. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan sekunder ini memberlakukan wawancara serta studi dokumen atau kepustakaan. Pelatihan ini merupakan wujud menjaga bangsa Indonesia dengan dilatarbelakangi permasalahan yang berkembang saat ini. Perumusan kebijakan kurikulum penyelenggaraan pelatihan kader bela negara menurut penelitian ini belum memiliki standarisasi penerapan pola dan metoda pelatihan. Penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kader bela negara di Rindam Jaya sebagai upaya mendukung pertahanan negara. Pengawasan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pelatihan mutlak diperlukan untuk menghasilkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang optimal. Pelatihan ini sangat penting bagi menumbuhkan cinta tanah air, disiplin dan bertanggung jawab terutama bagi generasi muda dalam rangka mencegah pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan mental pemuda sebagai penerus bangsa (Sahadi 2017).

Pendidikan bela negara mengajarkan mengenai nilai-nilai patriotik dalam peserta didik. Hal ini juga meningkatkan kecintaan peserta didik pada tanah air, semangat perjuangan, nasionalisme, patriotisme dan ketahanan fisik yang prima. Contoh materi yang diberikan dalam pendidikan bela negara diantaranya wawasan kebangsaan, baris-berbaris, disiplin waktu, *long march* dan kepemimpinan. Dengan demikian, pendidikan bela negara mempunyai kontribusi positif dalam membentuk siswa yang memiliki semangat patriotik sejak dini (Wijayanto dan Marzuki 2020).

Pendidikan bela negara bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan sederajat masuk ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung dengan kegiatan ekstra kulikuler Pramuka. Pendidikan bela negara yang disampaikan selama lima hari dengan jumlah 26 jam pelajaran masing-masing selama 30 menit dilaksanakan di SD Demangan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Sekolah ini pula melaksanakan program pendidikan bela negara melalui kegiatan intra kulikuler berupa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan upacara

bendera.Sedangkan kegiatan ekstra kulikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Jum'at dan Sabtu.Hal ini merupakan suatu bentuk pendidikan bela negara terhadap siswa sekolah dasar dan bentuk implementasinya (Khairunisa dan Ismaya 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan kesadaran warga negara akan pentingnya bernegara dengan menambahkan rasa cinta tanah air dan kepeduliannya terhadap negara. Dalam hal ini, masyarakat menjadi ikut berperan aktif dalam kehidupan sesuai dengan Pancasila.Masyarakat merupakan komponen suatu bangsa yang terkait di sebuah negara.Kebijakan yang dibuat menunjukkan kepada semua warga negara termasuk kepada masyarakat sendiri, sehingga masyarakat mempunyai peran penting dalam sebuah negara yaitu membela negaranya sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan pemerintah yang dibuat perlu ditaati jika aturan tersebut membawa kebaikan untuk kemaslahatan umat dan itu semua akan menciptakan negara yang bersatu, adil dan sejahtera (Nuryanti 2020).

Keterlibatan para intelektual (cendekiawan) birokrat untuk membuka daya persepsi segenap aparatur pemerintah terhadap tumbuhnya inovasi pemerintah diberbagai bidang sebagai upaya kolektif kebangsaan dalam mendukung persepsi positif program bela negara sangat diperlukan untuk ditelisik lebih dalam.Peran pada intelektual dalam rangka mencerdaskan bangsa dapat dilihat sejauh mana mekanisme *maintenance* yang dilakukan agar kontinuitas ilmu, pengetahuan, dogma atau bahkan ideologi yang diperoleh oleh aparatur, dapat lekat dan berkelanjutan, serta tidak menjadi sampah dalam bentuk jargon-jargon.Daya intelektualitas cendekiawan birokrat dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk mengkreasi rumusan inovasi yang komprehensif sesuai *roadmap* pertumbuhan berbasis inovasi dari Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan mempengaruhi lingkungan strategis birokrasi secara struktur maupun fungsi, dan masyarakat sebagai komponen penting Negara. Inovasi dengan berbagai dampak positif akan didedikasikan untuk tujuan yang lebih besar seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik yang lebih bermutu dan kemakmuran

bagi seluruh elemen bangsa (Aryandaru 2018).

## **B. Kurikulum Bela Negara**

Kesadaran bela negara diaktualisasikan melalui peningkatan kewaspadaan generasi muda. Kewaspadaan generasi muda terhadap memahami kesadaran nilai-nilai bela negara, kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kebenaran terhadap Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara, sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Kewaspadaan ini diharapkan memiliki kemampuan peduli, kesiapsiagaan serta tanggung jawab dalam peningkatan pencegahan dini, daya tangkal maupun daya cegah. Partisipasi masyarakat dalam kesadaran bela negara meliputi kegiatan pada lingkup pemerintahan, perusahaan, kemasyarakatan dan lingkungan dengan berbagai instansi, organisasi, institusi negeri, dan swasta maupun partai politik dapat memotivasi generasi muda terhadap peningkatan kewaspadaan nasional. Keberadaan generasi muda pada semua level kehidupan masyarakat perlu dilakukan pembinaan, motivasi serta sosialisasi kesadaran bela negara agar peningkatan kewaspadaan bagi generasi muda tetap dapat dipertahankan. Pemahaman terhadap kesadaran bela negara akan menghasilkan sikap dan perilaku yang melekat kewaspadaan bagi generasi muda dalam menyaring pengaruh budaya asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia, disebabkan beberapa budaya asing tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Indonesia memiliki budaya Pancasila yang bermoral dan beretika dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai ancaman bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara meliputi: invasi dan intervensi negara lain, subversi, makar, kudeta, separatisme, terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba, premanisme, penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, *human trafficking*, dan perbuatan anarkisme dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Koordinasi, sinergitas, dan Kerjasama pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) mewujudkan meningkatnya kesadaran bela negara dan kewaspadaan generasi muda

melalui program kegiatan kesadaran bela negara. Hal ini juga didukung sebagai landasan dalam kehidupan nasional (Suriata 2019).

Kebijakan bela negara merupakan upaya Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membentuk pertahanan nirmiliter. Berdasarkan implementasinya, kebijakan ini diperlukan untuk membentuk kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan Pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan bela negara saat ini mengandung empat konsep pembelajaran yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan wajib militer, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan semi-TNI (Tentara Negara Indonesia). Adapun lima dasar kurikulum ini diantaranya adalah cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi negara dan kemampuan bela negara secara fisik dan non-fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini memiliki prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta sehingga memerlukan kesetimbangan antara pertahanan militer dan non-militer. Prospek tersebut sebaiknya merumuskan kesetimbangan interaksi unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan pengeluaran. Penelitian terbaru membuktikan pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia, sehingga metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Target utama pendidikan ini sebaiknya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi pada generasi muda (Matondang 2018).

Bela negara adalah hak dan kewajiban bagi warga negara sesuai dengan UUD 1945. Hal ini merupakan salah satu sistem pertahanan rakyat semesta yang perlu dilakukan demi mengantisipasi segala macam ancaman yang kompleks dan multidimensional dalam usaha menghadapi ancaman saat ini dan masa depan yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk meratakan Bela Negara agar diterima oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu melalui pendidikan. Pelaksanaan Bela Negara dalam ruang lingkup pendidikan tidak akan terlaksana jika tidak ada landasan yang memuat tentang Bela Negara. Struktur kurikulum Bela Negara yang meliputi

cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan Bela Negara. Untuk menyempurkannya hal ini yang dapat dijadikan landasan implementasi dalam pendidikan formal tersebut maka diperlukan pengembangan kurikulum dengan adanya kerjasama antara kementerian terkait dan melibatkan ahli kurikulum beserta seluruh elemen terkait untuk dapat mengembangkan kurikulum Bela Negara (Kurniawan dan Utanto 2018).

Penerapan pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi melalui kurikulum diantaranya tolak ukur/parameter keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang harus memiliki 5 (lima) nilai dasar. Ancaman Indonesia ke depan baik dari dalam atau luar dalam waktu dekat maupun jangka panjang yang nyata dapat menghambat program pemerintah, mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara maka Penerapan Kader Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di kalangan mahasiswa perlu diambil langkah dan Tindakan dengan cepat, serentak, lebih serius, terarah dan terukur masuk ke semua sektor/lini melalui berbagai kegiatan nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Pendidikan Bela Negara di kalangan Mahasiswa dalam hal ini memperoleh momentum, sebagai solusi yang dianggap tepat atas ancaman tersebut. Jalinan kerjasamanya antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan perguruan tinggi harus disikapi sebagai suatu kesadaran akan kondisi pergeseran ancaman maupun tantangan bagi Indonesia. Suatu langkah pembaruan reorientasi dan reformulasi pola pendidikan bela negara di kalangan mahasiswa dari satu arah menjadi beragam arah, dari yang sangat teknologis ke arah humanis. Pemanfaatan teknologi terkini, sumber daya manusia unggul, hingga kesadaran kebangsaan yang tebal dalam pola hubungan militer dan pendidikan perguruan tinggi merupakan bentuk pembaruan yang bersinergi guna mengatasi ancaman (Gredinand 2017). Pendidikan bela negara bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi (Indrawan dan Aji, 2018).

Selain menekankan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran Geografi juga dapat meningkatkan

semangat bela negara. Penelitian ini dilakukan oleh Gadeng *et al.* 2020 terhadap siswa SMA di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini terwujudnya semangat bela negara yang merupakan program yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah saat ini. Bela negara juga dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kategori dan usianya masing-masing. Dalam pembelajaran SMA, salah satunya mata pelajaran Geografi terdapat pembahasan tentang materi yang dapat menggugah minat siswa untuk menjaga atau membela keutuhan negara. Peran guru geografi sangat strategis dalam meningkatkan semangat bela negara, dan diharapkan pula kesadaran siswa melalui proses internalisasi dikategorikan berhasil, serta berdampak positif terhadap keutuhan Negara Indonesia. pemerintah juga diharapkan untuk menjadikan geografi sebagai mata pelajaran wajib untuk peserta didik di Indonesia. Hal ini dikarenakan mata pelajaran Geografi sangat strategis dalam meningkatkan semangat bela negara pada siswa SMA (Gadeng *et al.* 2020).

## KESIMPULAN

Kebutuhan pendidikan bela negara untuk kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa sudah saatnya mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemangku kebijakan baik dari lingkungan pemerintah maupun lingkungan pendidikan. Berbagai ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa negara kedepannya tidak hanya berupa ancaman militer, namun ancaman yang dihadapi semakin hari semakin kompleks yaitu ancaman nir militer yang dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme para pelajar, karena sesungguhnya, masa depan bangsa dan negara ini berada di dalam generasi saat ini. Peran pemerintah dan tenaga pendidik disini menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memacu para pelajar mengembangkan ilmunya didalam hal inovasi dan kreatifitas. Dengan adanya pelajar yang berhasil mengembangkan ilmunya ini tentunya akan sangat dapat membanggakan negaranya. Hal ini juga termasuk ke dalam nilai bela negara yakni dengan mengharumkan nama bangsanya dengan hal-hal yang positif. Dari sinilah yang perlu untuk

dipikirkan kembali, yaitu pengemasan dalam pemberian pendidikan bela negara kepada pelajar dengan lebih inovatif supaya para generasi penerus bangsa ini lebih mampu untuk memahami lebih mendalam lagi mengenai bela negara, pentingnya rasa nasionalisme untuk memperkuat kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, „Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta, PT“, Bumi Aksara, 2012.
- Arifin, Aminudin, Konsep manajemen Pendidikan. (diambil dari <https://kelasips.com/manajemen-pendidikan/> (diakses pada 22 Juli 2021), 1997.
- Aryandaru, S, Peran cendekiawan birokrat terhadap tren penumbuhan inovasi sektor publik dalam rangka manifestasi bela negara, *Jendela Inovasi Daerah*. Vol. 1, no. 2: 62-77, 2018
- Budiwibowo, S, Revitalisasi pancasila dan bela negara dalam menghadapi tantangan global melalui pembelajaran berbasis multicultural, *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 2, 2016
- Danial, E, Wasriah, N, Metode Penulisan Karya Ilmiah, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009.
- Gadeng, AN, Ningrum, E, Abdi, AW, Aziz, D, Desfandi, M, Kontribusi mata pelajaran geografi untuk meningkatkan semangat bela negara siswa SMA di Provinsi Aceh, *Jurnal Geografi GEA*, Vol. 20, no. 1, 2020.
- Gredinand, D, Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi, *Strategi Pertahanan Darat*, Vol. 3, no. 2, 2017.
- Handriani, DJ, Bab II: Metode penelitian, Bandung: UNIKOM, 2017.
- Hidayat, AW, Inovasi kurikulum dalam perspektif komponen-komponen kurikulum pendidikan Agama Islam, *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, Vol. 2, No. 1: 111-129, 2020.
- Indrawan, J, Aji, MP, Pendidikan bela negara sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, no. 3: 1-24, 2018.
- Iryanti, I, Nawa cita kita, (diambil dari

- <https://www.kompasiana.com/irmairyanti/556e3476bd22bdde0eeeddac/nawa-cita-kita> (diakses pada 22 Juli 2021), 2015.
- Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: PRadigma, 2013.
- Kemenhan, Peraturan menteri pertahanan republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. (diambil dari) <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/14/peraturan-menteri-pertahanan-republik-indonesia-nomor-32-tahun-2016-tentang-pedoman-pembinaan-bela-negara.html> (diakses pada 22 Juli 2021), 2016.
- Khaerudin, TA. Kurikulum dan Pembelajaran. (diambil dari) <https://adekhaerudin.wordpress.com/2014/03/07/kurikulum-dan-pembelajaran/> (diakses pada 22 Juli 2021), 2007.
- Khairunisa, I, Ismaya EA, Implementasi Pendidikan bela negara di sekolah dasar. Pendidikan Bela Negara, Vol. 93, no. 98, 2020.
- Kurniawan, DM, Utanto, Y, Kurikulum bela negara sebuah kebutuhan kurikulum saat ini dan masa depan, Defendonesia. Vol. 3, No. 2: 1-12, 2018.
- Matondang, E, Kurikulum bela negara di tingkat pendidikan tinggi: prospektif ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 5, no. 3: 21-42, 2018.
- Nanang, Fattah, Konsep manajemen Pendidikan. (diambil dari) <https://kelasips.com/manajemen-pendidikan/> (diakses pada 22 Juli 2021), 2011.
- Nuryanti, S, Peran masyarakat untuk bela negara dalam menghadapi Covid-19 (The role of society for defending the country in facing COVID-19), SSRN, 2020.
- Pidarta, M, Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, Solo: Rineka Cipta, 2013.
- Pitaloka, AR, Wibawani S, Implementasi kebijakan pembangunan karakter bela negara melalui mata kuliah Pendidikan bela negara di Universitas Pembangunan Nasional ‘veteran’ Jawa Timur, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim, Vol. 9, no. 1, 2019.
- Prihatin, E, Konsep Pendidikan, Bandung: Karsa Mandiri Persada, 2018.
- Putri, HR, Metiadini A, Rahmat HK, Uksan A, Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial

- di Indonesia, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, no. 2, 2020.
- Rahmawati, I, Effectiveness state defense education to increase nationalism of Indonesian Student in community learning center Sarawak Malaysia, *Jurnal Program Studi Manajemen Pertahanan*, Vol. 3, no. 1, 85–105, 2017.
- Rusmaini, Konsep manajemen Pendidikan, (diambil dari) <https://kelasips.com/manajemen-pendidikan/> (diakses pada 22 Juli 2021), 2011.
- Sahadi, S, Implementasi pelatihan kader bela negara di Rindam Jaya guna mendukung pertahanan negara, *Strategi Pertahanan Darat*, Vol. 3, no. 3, 2017.
- Sormin, MPD, Rahmayanti, M, Aslamiyah, R, Konsep Pendidikan dalam perspektif pemikiran Ibnu Sina, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, no. 1, 87–95, 2020.
- Subagyo, A, Syarat-syarat kesiapan penyelenggaraan program bela negara, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 5, No. 3: 1-20, 2018.
- Sumar, WT, Razak IA, *Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, Sleman: Deepublish, 2016.
- Suriata, IN, Aktualisasi kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam meningkatkan ketahanan nasional, *Public Inspiration: Journal Administrasi Publik*, Vol. 4, no. 1: 47-56, 2019.
- Umra, SI, Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara, *Lex Renaissance*, Vol. 4, no. 1: 164-178, 2019.
- Wantannas, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Bela negara; pengertian, unsur, fungsi, tujuan dan manfaat bela negara. (diambil dari) <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/> (diakses pada 22 Juli 2021), 2018.
- Wijayanto, R, Marzuki, J, Pendidikan bela negara sebagai tonggak peradaban jiwa patriotisme generasi muda, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, no. 2, 186, 2018.
- Wijayanto R, Marzuki J, Penguatan nilai patriotik melalui pendidikan bela negara di SMA negeri Titian Teras Has Jambi, *Jurnal Ilmu Sosial dan*

**218** | Pendidikan Bela Negara di dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia (198-218). Available at :<https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/37>

Humaniora, Vol. 7, no.2: 136-146, 2020.

Zed, M, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008